



RISALAH BANTEN

**MENEGUHKAN ARAH,
MENGGERAKKAN PERUBAHAN**

Disampaikan pada Tanwir XXXIV
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
di Banten, 02-05 September 2026

Oleh
Dewan Pimpinan Daerah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2025 - 2027



RISALAH BANTEN

**MENEGUHKAN ARAH,
MENGGERAKKAN PERUBAHAN**

Tim Penyusun:

Ahsan Taqwim Al-Akid
Muhammad RM Fayasy Failaq

Editor dan Layout:

Muhammad Hafizh Ar-Raiyan

SEBUAH PENGANTAR

Mayda Dwi Hadiyanti
Ketua Umum DPD IMM DIY



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mengatur setiap langkah ikhtiar dan perjuangan, Yang senantiasa melimpahkan rahmat kekuatan serta kejernihan hati dalam menapaki jalan pengabdian. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW teladan utama dalam meneguhkan iman, menghidupkan ilmu dan menghadirkan amal sebagai jalan membangun kehidupan yang berkeadaban.

Setiap zaman menghadirkan tantangan yang menuntut gerakan untuk terus membaca, berbenah, dan menentukan kembali arahnya. IMM sebagai bagian dari gerakan mahasiswa Islam dan kader persyarikatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan organisasi senantiasa berjalan seiring dengan penguatan gagasan, kepemimpinan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan kebangsaan.

Atas kesadaran tersebut, ***Risalah Banten: Meneguhkan Arah, Menggerakkan Perubahan*** ini hadir sebagai bagian dari ikhtiar DPD IMM DIY untuk membumikan semangat merawat solidaritas, menjaga Indonesia. Risalah ini tidak dimaksudkan sebagai jawaban akhir atas berbagai persoalan Ikatan, melainkan sebagai sumbangan gagasan dan rekomendasi strategis untuk membaca kebutuhan IMM hari ini sekaligus menyiapkan arah gerak Ikatan ke depan.

Di dalamnya, kami mencoba menawarkan sejumlah pandangan mengenai kepemimpinan nasional IMM, tata kelola organisasi, penguatan representasi, partisipasi kader, serta penataan arah gerakan agar IMM mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan akar ideologis dan tradisi intelektualnya.

Risalah ini adalah hadir sebagai ruang untuk merumuskan kembali kepemimpinan dan arah gerakan IMM yang lebih adil, adaptif, inklusif, dan transformatif. Karena merawat solidaritas tidak cukup hanya dengan menjaga kebersamaan, dan menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan menyuarakan kegelisahan. Keduanya membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan potensi, menggerakkan gagasan, dan menghadirkan perubahan.

Akhir kata, kami meyakini bahwa merawat solidaritas berarti merawat rumah besar IMM, menjaga Indonesia berarti menghadirkan kader-kader yang mampu mengabdikan ilmu, iman dan amalnya bagi kehidupan bangsa

MEMBACA TANTANGAN GERAKAN IKATAN



Epistemologi Gerakan dalam Arus Informasi dan Dunia Digital

Muhammadiyah memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral dan intelektual yang hadir dalam dinamika kebangsaan. Namun, keterbukaan ruang publik hari ini menghadirkan tantangan baru bagi gerakan dakwah persyarikatan, yakni suara yang semakin beragam yang tidak sejalan dengan efektivitas dalam mempengaruhi arah kebijakan. Akibat transformasi masyarakat yang turut hidup dalam dunia digital kini, akses atas informasi dan isu sosial, serta variasi tindakan penanganannya menjadi kian luas secara kuantitas namun mengalami kontradiksi dengan kehidupan berkebangsaan yang terus menerus tidak ideal. Degradasi dalam berbagai hal terindeks dan tampak secara nyata dalam menurunnya kemampuan ekonomi, politik dan demokrasi, serta kehidupan sosial bangsa.

Fragmentasi Kader dan Tradisi

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memiliki energi (serta *ghirah*) kader, tradisi intelektual, dan jejaring gerakan yang luas. Hal ini patut dibaca dalam berbagai lini; inklusivitas sumber daya, pertumbuhan basis-basis kader dan kepengurusan yang menjangkau internasionalisasi, serta menguatnya infrastruktur perkaderan di akar rumput melalui perguruan tinggi yang terus tumbuh secara kuantitas. Namun, modal tersebut tidak dengan sendirinya menjadi kekuatan kolektif tanpa kepemimpinan yang mampu memberikan arah dan makna bersama. Fragmentasi agenda dan orientasi dapat membuat potensi kader berjalan sendiri-sendiri, sementara persoalan bangsa menuntut gerakan yang lebih terarah dan kolektif serta berani mengambil posisi. Apabila dibiarkan, gerakan IMM hanya menjadi rumput yang tumbuh banyak ke samping, daripada tumbuhan yang menjulang tinggi dan meneduhkan.

MEMBACA TANTANGAN GERAKAN IKATAN

Paradoks Otoritas dan Keteladanan Pemimpin

Kepemimpinan hari ini berhadapan dengan paradoks antara besarnya otoritas dan menipisnya keteladanan. Kekuasaan memiliki perangkat yang semakin kuat, tetapi tidak selalu diikuti kemampuan menghadirkan arah moral dan keberpihakan pada kepentingan publik. Kepemimpinan kerap berhenti pada kompetensi mengelola kekuasaan, sementara dimensi etik, visi, dan tanggung jawab sosial justru mengalami defisit. Dalam keadaan demikian, krisis kepemimpinan bukan hanya persoalan siapa yang memimpin, tetapi untuk apa kekuasaan digunakan dan nilai apa yang diperjuangkan melalui kepemimpinan

Muhammadiyah mewariskan konsep kepemimpinan yang bertumpu pada amanah, keteladanan, ilmu, dan kebermanfaatan. Semangat amar ma'ruf nahi munkar dan Islam Berkemajuan menempatkan kepemimpinan sebagai jalan menghadirkan perubahan, bukan sekadar mempertahankan keteraturan.

Aktivisme dalam Demokrasi yang tidak Bermakna

Perubahan lanskap kebangsaan juga menuntut IMM untuk memperluas pemaknaan terhadap aktivisme. Aktivisme mahasiswa selama ini memiliki tradisi panjang dalam menyuarakan kepentingan publik, melakukan kontrol terhadap kekuasaan, dan membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat. Namun, perubahan persoalan publik menuntut bentuk keterlibatan yang semakin kompleks. Persoalan publik tidak cukup hanya dikritisi ketika keputusan telah ditetapkan, sebab arah kebijakan telah ditentukan sejak persoalan dirumuskan dan berbagai kepentingan mulai dipertarungkan. Pada sisi lain, demokrasi menjanjikan ruang partisipasi yang luas, tetapi keterbukaan ruang publik belum selalu menghadirkan representasi yang bermakna. Suara masyarakat semakin mudah disampaikan, namun tidak selalu memiliki jalan menuju ruang keputusan. Politik kemudian berisiko berubah menjadi arena pertukaran kepentingan yang jauh dari aspirasi publik, sementara masyarakat ditempatkan sebagai penonton dalam proses yang menentukan kehidupannya sendiri. Problem demokrasi dengan demikian berdampak pada sejauh mana partisipasi, termasuk melalui aktivisme mahasiswa, mampu menjadi daya pengaruh terhadap kekuasaan.

Tantangan Transformasi Praksis Gerakan

IMM lahir dari tradisi yang menempatkan ilmu sebagai basis gerakan. Namun, di tengah kompleksitas persoalan bangsa, terdapat jarak antara produksi pengetahuan dan kemampuan mengubah kenyataan. Diskusi semakin banyak, kajian semakin berkembang, tetapi gagasan belum selalu menemukan jalan menuju praksis. Ilmu berisiko menjadi pengetahuan yang berputar di ruang internal gerakan apabila tidak diterjemahkan menjadi keberpihakan, advokasi, dan perubahan sosial. Tantangan IMM kedepan yaitu bagaimana menjadikan intelektualisme sebagai kekuatan transformatif.



POKOK ISI RISALAH

Membaca dan merenungi tantangan-tantangan yang dihadapi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kini berupa epistemologi gerakan di dunia digital, fragmentasi kader dan tradisi, paradoks otoritas dan keteladanan pemimpin, aktivisme dalam demokrasi yang tidak bermakna, dan transformasi praksis gerakan, **Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)** menyadari pentingnya peran-peran ideal yang harus ditumbuhkan sekaligus dikuatkan dalam akar gerakan. Kondisi ideal ini, kami meyakini, bukan merupakan sebuah utopia serta tantangan tersebut dapat dihindarkan dari distopia apabila disertai dengan kepemimpinan dalam skala tertinggi yang mampu menghadirkan kapasitas moral, intelektual, dan kepemimpinan yang baik. Baris-baris selanjutnya adalah peran IMM yang merupakan inti dari Risalah ini.

POKOK ISI RISALAH

IMM harus hadir sebagai *knowledge-based civil society* di tengah derasny arus informasi kontemporer, yang menjadikan tradisi intelektual sebagai sumber daya strategis gerakan dan semangat tajdid sebagai basis untuk membaca perubahan, mengoreksi ketimpangan, dan menghadirkan gagasan alternatif bagi kehidupan kebangsaan. Dalam semangat Islam Berkemajuan, gerakan IMM ditempatkan untuk mampu menjadikan ilmu sebagai kekuatan emansipatoris dan dakwah sebagai praksis transformasi sosial, sehingga keberadaannya tidak berhenti pada kemampuan menyuarakan persoalan, tetapi memiliki daya untuk membentuk wacana dan arah perubahan. Pengetahuan harus diposisikan sebagai political resource dalam perjuangan kebangsaan. Riset tidak berhenti sebagai produk akademik, gagasan tidak berhenti sebagai wacana, dan advokasi tidak berhenti sebagai respons sesaat. Ketiganya harus bertemu dalam praksis yang mampu menghubungkan ilmu dengan kepentingan publik. Dengan demikian, IMM dapat bergerak dari *protest politics* menuju *politics of ideas* dengan basis kemampuan menghadirkan rekomendasi strategis dan alternatif kebijakan, serta dari kekuatan suara menuju daya pengaruh terhadap kebijakan publik.

Kepemimpinan Nasional IMM harus hadir sebagai *transformational leadership* yang mampu melampaui fungsi administratif dan tidak sekadar mengelola organisasi, namun mampu membangun visi bersama, menghidupkan kesadaran kolektif, dan menggerakkan kader untuk menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai kekuatan perubahan. Pada saat yang sama, DPP IMM membutuhkan *strategic leadership* yang mampu membaca perubahan zaman, menentukan posisi gerakan, dan mengarahkan energi kader pada persoalan-persoalan strategis umat dan bangsa. Dengan kepemimpinan tersebut, keberagaman potensi IMM tidak berhenti sebagai kekuatan yang tersebar, tetapi menemukan arah kolektif sebagai kekuatan intelektual, moral, dan kebangsaan yang mampu mempengaruhi perubahan.

IMM perlu menerjemahkan warisan kepemimpinan yang bertumpu pada amanah, keteladanan, ilmu, dan kebermanfaatan dalam dunia saat ini. Sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah, gerakan ini telah hidup dalam cermin nilai-nilai kepemimpinan yang ideal yang terus diwariskan. Untuk itu, kepemimpinan Nasional IMM harus hadir sebagai transformational leadership yang mampu membangun visi, menghidupkan kesadaran kolektif, dan menggerakkan kader untuk melampaui kepentingan organisasi menuju kepentingan umat dan bangsa. Dengan demikian, kepemimpinan IMM harus melahirkan arah dan keteladanan bagi gerakan kebangsaan.

IMM harus memperluas peran kebangsaan Muhammadiyah bagi generasi muda. Muhammadiyah telah lebih dari satu abad hadir sebagai kekuatan masyarakat sipil yang bergerak melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan sosial, dan penguatan kehidupan warga. Dalam kerangka *Darul Ahdi wa Syahadah*, kebangsaan bukan sekadar identitas, tetapi ruang kesaksian untuk mewujudkan nilai Islam dalam kehidupan bersama. IMM memiliki posisi strategis untuk memperluas peran tersebut serta tumbuh sebagai *civil society power* yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik, membangun wacana, dan mengawal kebijakan secara kritis. Gerakan kebangsaan tidak cukup hanya memiliki suara, namun sekaligus memiliki daya pengaruh. Oleh karena itu, IMM perlu bergerak menjadi kekuatan intelektual yang mampu ikut menentukan agenda publik.

POKOK ISI RISALAH

Di sinilah semangat tajdid dan Islam Berkemajuan menemukan relevansinya bagi IMM. Pembaruan tidak cukup dilakukan pada tataran pemikiran, tetapi harus mampu menjawab perubahan realitas dan menghadirkan kemaslahatan. Tradisi gerakan ilmu IMM perlu diarahkan menjadi *knowledge-based movement* yang menjadikan riset, ilmu, dan pengalaman kader sebagai sumber daya strategis dalam kehidupan publik. Gagasan *research-driven leadership* yang telah menjadi perhatian DPD IMM DIY perlu diperluas menjadi kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan kebijakan, kritik dengan advokasi, dan gagasan dengan perubahan. Dengan demikian, IMM kedepan harus memiliki identitas sebagai organisasi yang memiliki kapasitas untuk menghadirkan jalan keluar dan mengawal perubahan. Bersamaan dengan itu, **DPD IMM DIY mendorong:**

- 1. Menghadirkan** kepemimpinan nasional IMM yang transformatif, berintegritas, dan berbasis kompetensi agar IMM mampu menjadi pengarah gerakan yang berakar pada nilai-nilai Islam, tajdid, dan Kepribadian Muhammadiyah
- 2. Meneguhkan** posisi IMM sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik, memperkuat representasi generasi muda, serta berdaya pengaruh dalam mengawal demokrasi dan kebijakan publik
- 3. Memperkuat** kembali gerakan ilmu sebagai kekuatan praksis kebangsaan melalui riset, produksi pengetahuan, dan advokasi kebijakan agar intelektualisme IMM tidak berhenti sebagai wacana, tetapi mampu mempengaruhi keputusan dan menghadirkan perubahan sosial
- 4. Memperluas** peran IMM sebagai bagian dari *civil society power* Muhammadiyah dalam mewujudkan *Darul Ahdi wa Syahadah*, dengan menjembatani nilai, pengetahuan, dan gerakan untuk menghadirkan kebermanfaatan yang berdaya dan berdampak bagi umat, persyarikatan, dan bangsa

Pada akhirnya, setiap perubahan zaman selalu menuntut gerakan untuk meninjau kembali arah, posisi, dan relevansinya. Kepemimpinan merupakan instrumen penting karena di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk menjaga nilai, membaca perubahan, dan menentukan orientasi gerakan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memiliki warisan intelektual, ideologis, dan kebangsaan yang menjadi modal penting untuk terus menghadirkan kebermanfaatan di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Namun, warisan tersebut hanya akan memiliki makna apabila mampu diterjemahkan menjadi kesadaran, gagasan, dan praksis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, masa depan IMM membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar mempertahankan apa yang telah ada, tetapi memiliki keberanian untuk memperbarui, kemampuan untuk mengarahkan, serta keteguhan untuk memastikan bahwa gerakan tetap berpijak pada nilai dan keberpihakan kepada kepentingan yang lebih luas. Pada titik inilah kepemimpinan berperan dalam menjaga kesinambungan nilai sekaligus membuka kemungkinan bagi perubahan



GAGASAN REKOMENDASI

DPD IMM DIY menegaskan bahwasannya IMM kedepannya perlu berfokus pada 4 (empat) agenda yaitu, penguatan representasi dan keadilan dalam kepemimpinan IMM, pembangunan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap tantangan zaman, perluasan ruang partisipasi seluruh elemen kader, serta pengembangan IMM sebagai ruang pertemuan dan gerakan kebangsaan yang inklusif. Penyelenggaraan Sidang Tanwir XXXIV Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan ruang diskursus strategis dan konstruktif untuk membahas dan merumuskan perbaikan kelembagaan IMM ke depan. Berangkat dari gagasan tersebut, melalui risalah ini DPD IMM DIY merumuskan rekomendasi strategis sebagai berikut:

Mekanisme Pemilihan Formatur dan Ketua Umum di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang Berbasis Prinsip *Fairness*

Pemilihan calon formatur dan ketua umum merupakan mekanisme demokrasi dalam ikatan yang turut menghasilkan kader-kader terbaik yang akan mengemban amanah tertinggi dalam struktur organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Untuk itu, proses yang adil adalah esensial dalam menghasilkan calon-calon terpilih serta mengedepankan partisipasi dan keterlibatan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan logika kewajaran yang mendasar yang sudah harus melekat dalam gerakan serta benak intelektualitas ikatan. Secara transendental, ini juga merupakan amanat untuk berlaku adil dalam memutus serta melaksanakan musyawarah dalam urusan yang arif secara substantif.

Lebih spesifik, persoalannya adalah ketidakadilan hak suara yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki struktural cabang yang lebih banyak daripada lainnya yang jumlahnya lebih sedikit. Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak setara antara para kubu dalam ikatan. Dampak jangka panjangnya adalah pucuk kepemimpinan akan terfavoritkan bagi kubu-kubu besar tertentu dan amat mustahil untuk diraih oleh kubu-kubu kecil. Patronase politik besar kemungkinan akan terpelihara. Hasil akhir, kapasitas calon formatur dan ketua, yang layak secara moral, intelektualitas, dan kapasitas kepemimpinan akan terpinggirkan akibat dari sistem yang tidak adil sekaligus tidak menghendaki yang terus dipelihara.

Poin Rekomendasi ini mengerucut pada usul strategis untuk:

1. Membatasi hak pilih untuk memilih calon formatur dan ketua umum hanya kepada peserta yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat sehingga terjadi keadilan dan kepantasan antara masing-masing Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan peserta yang memberikan rekomendasi bagi para calon
2. Pimpinan Cabang akan tetap menjadi peserta Mukhtamar dalam agenda permusyawaratan untuk mendiskusikan dan menentukan arah organisasi secara luas. Dengan demikian hak-hak untuk terlibat dalam membentuk arah ikatan secara nasional dengan baik tetap dapat terwujud dengan model yang arif
3. Dalam sistem pemilihan ketua umum baik melalui sistem formatur atau dipilih secara langsung oleh para muktamirin akan tetap relevan dan harus tetap mengedepankan prinsip *fairness* yang demikian, sebab pada dasarnya yang dipersoalkan adalah ketimpangan hak pilih, bukan metode pemilihan yang mendasari permusyawaratan di IMM.

***Affirmative Action* Immawati dalam Pencalonan Formatur DPP IMM**

Logika afirmatif adalah upaya untuk mewujudkan keadilan, khususnya bagi kaum yang terpinggirkan, dengan memberikan diskriminasi positif berupa pemberian hak khusus. Dengan latar sosial, secara nasional, dimana terjadi ketimpangan gender, maka memberikan hak khusus bagi perempuan adalah mekanisme yang sewajarnya dilakukan dalam berbagai forum, termasuk politik. Lingkup Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak terlepas dari persoalan ini, kader-kader terbaik dari Immawati perlu diberikan kebijakan afirmatif untuk mendukung representasinya dalam struktur Ikatan.

Rekomendasi ini mengarah pada langkah strategis untuk menyediakan mekanisme rekomendasi pencalonan formatur DPP IMM yang memberikan ruang afirmatif bagi keterwakilan Immawati. Mekanisme tersebut diarahkan untuk menjamin sekurang-kurangnya 30% dari calon formatur yang direkomendasikan merupakan Immawati yang memenuhi persyaratan pencalonan. Kebijakan ini sebagai langkah afirmatif dan stimulatif untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan nasional IMM. Pelaksanaan prinsip afirmatif ini sebagai upaya membuka kesempatan yang lebih setara bagi Immawati untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional IMM. Namun demikian, hal ini harus tetap berlandaskan pada prinsip kompetensi, integritas, kapasitas, dan meritokrasi, sehingga afirmasi keterwakilan perempuan tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap kualitas dan kelayakan calon.

Sekretariat DPP IMM di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Ideologis dan Intelektual

Sekretariat memegang posisi strategis untuk menjadi sumbu gerakan secara geografis. Secara nilai, tempat dimana sekretariat itu berada menggambarkan adanya karakter dan fungsi tertentu yang representatif dan memiliki dampak terhadap gerakan ikatan. Saat ini, keberadaan sekretariat yang berkedudukan di Ibu Kota, Jakarta, setidaknya menggambarkan karakter dan fungsi sebagai sekretariat politik sebab letaknya yang tidak jauh dari pusat pemerintahan secara nasional. Untuk itu, diperlukan sekretariat lain yang memiliki fungsi dan karakter yang mencerminkan gerakan moral dan intelektual. Yogyakarta, letak dimana IMM didirikan, serta dimana Sekretariat IMM pertama pernah berada perlu dipertimbangkan untuk menjadi lokasi tersebut.

Rekomendasi ini mengusulkan langkah strategis berupa pendirian Sekretariat DPP IMM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu upaya memperkuat fungsi ideologisasi, kaderisasi, intelektualisasi, dokumentasi, kelembagaan dan konsolidasi organisasi di tingkat nasional. Usulan ini didasarkan pada posisi strategis DIY sebagai salah satu pusat ideologis dan intelektual Muhammadiyah. Secara ideologis, Yogyakarta memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan kelahiran, perkembangan, dan dinamika gerakan Muhammadiyah. Sementara secara intelektual, Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kota pelajar yang menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, tradisi keilmuan, dan gerakan kemahasiswaan.

Keberadaan Sekretariat DPP IMM di DIY diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi kader, pengembangan gagasan, penguatan jejaring intelektual, serta penghubung antara agenda nasional DPP IMM dengan potensi kader dan ekosistem gerakan yang berkembang di Yogyakarta dan sekitarnya.

Pada sisi lain, model Sekretariat di dua lokasi yang berbeda bukan merupakan hal yang asing dalam lingkungan Muhammadiyah. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) turut berada di dua kota yang berbeda, Jakarta dan Jogja. Dengan mengimitasi letak geografis yang serupa dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai contoh, akan berdampak pada kolaborasi yang lebih efisien baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Argumentasi lain yang lebih sederhana adalah pengurus DPP IMM dapat hidup secara lebih ekonomis dengan kehidupan yang lebih terjangkau di Yogyakarta, terlebih bagi pengurus yang berasal dari wilayah timur Indonesia yang lebih mudah menjangkau Yogyakarta daripada Jakarta.

Partisipasi dan Representasi PC IMM Luar Negeri dalam Forum Strategis IMM

Mendorong penguatan ruang partisipasi dan representasi PC IMM Luar Negeri dalam forum-forum strategis IMM. Hal ini termasuk dalam penyampaian aspirasi, perumusan kebijakan, produksi gagasan, serta pengambilan keputusan organisasi. Partisipasi PC IMM Luar Negeri harus didorong sebab dengan sebagai bagian dari upaya menjadikan pengalaman global kader sebagai sumber pengetahuan dan kekuatan strategis gerakan IMM.

Mengingat arah gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang makin gencar mengusung internasionalisasi dan inklusivitas, pelibatan aktif Pimpinan Cabang Luar Negeri (PC LN) bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis. Oleh karena itu, DPP IMM perlu untuk melakukan langkah konkrit untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini meliputi:

1. Penyediaan Kuota dan Akses Penuh di Forum Pengambilan Keputusan: Memastikan PC LN IMM memiliki hak suara dan ruang partisipasi yang setara dalam forum-forum tertinggi organisasi, seperti Tanwir, Muktamar, maupun Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), baik secara hadir langsung maupun fasilitasi secara *hybrid*.
2. Integrasi Isu Global dalam Agenda Kebijakan DPP: Mengakomodasi gagasan dan dinamika kader di luar negeri seperti isu diplomasi publik, jaringan akademis internasional, dan adaptasi gerakan dengan konteks hukum/budaya lokal.
3. Kolaborasi Program Strategis Lintas Cabang: Mendorong kemitraan antara DPP, DPD, dan PC LN untuk program-program riset, publikasi ilmiah internasional, dan pengabdian masyarakat lintas negara.
4. Pemberdayaan Kader PC LN sebagai Duta Gerakan: Menjadikan kader-kader PC LN sebagai ujung tombak Muhammadiyah di ranah global, menghubungkan IMM dengan organisasi kepemudaan internasional serta jejaring diaspora.

Melalui langkah-langkah inklusif ini, diharapkan PC LN IMM tidak hanya berperan sebagai perpanjangan tangan organisasi di luar negeri, tetapi juga menjadi kontributor aktif dalam merumuskan arah kebijakan masa depan ikatan secara global.

Penataan Bidang-Bidang IMM secara Adaptif dan Berbasis Kebutuhan

Mendorong penataan bidang-bidang DPP IMM secara adaptif dan berbasis kebutuhan zaman melalui evaluasi menyeluruh terhadap nomenklatur, mandat, fungsi, dan orientasi kerja setiap bidang, sehingga struktur DPP IMM memiliki pembagian kerja yang relevan, tidak tumpang tindih, responsif terhadap perkembangan persoalan sosial, politik, ekonomi, teknologi, keilmuan, dan profesionalisme kader, serta mampu menerjemahkan kebutuhan gerakan ke dalam kerja organisasi yang lebih strategis dan berdampak. Perubahan zaman, perkembangan dinamika publik menuntut IMM agar mampu menjawab tantangan dan persoalan publik, IMM harus hadir sebagai organisasi yang memiliki peran strategis, berdampak dan memberikan solusi atas persoalan publik kontemporer, sehingga penataan dan adaptasi bidang tidak hanya diorientasikan untuk kerja organisasi secara internal, melainkan penerjemahan relevansi spirit zaman terhadap gerakan dan program IMM yang berdampak terhadap ruang-ruang publik dan struktur sosial-masyarakat



Risalah ini merupakan ikhtiar untuk memastikan IMM mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan akar ideologis, tradisi intelektual, dan tanggung jawab kebangsaannya. Berbagai gagasan dan rekomendasi yang ditawarkan bermuara pada kebutuhan untuk membangun Ikatan yang lebih adil, adaptif, inklusif, dan memiliki daya pengaruh. Dengan demikian, kelembagaan IMM harus diarahkan dalam rangka memperkuat kapasitas gerakan agar mampu mengubah potensi menjadi kekuatan, pengetahuan menjadi praksis, dan nilai menjadi kebermanfaatan. Di titik itulah IMM dapat terus meneguhkan arah sekaligus menggerakkan perubahan bagi umat, persyarikatan, dan bangsa.

*Dewan Pimpinan Daerah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Daerah Istimewa Yogyakarta
2026*

Tim Penyusun



Ahsan Taqvim Al-Akid
(Ketua DPD IMM DIY
Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik)



Muhammad RM Fayasy Fallaq
(Ketua DPD IMM DIY
Bidang Hukum dan HAM)

Editor dan Layout

Muhammad Hafizh Ar-Raiyan

